

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara yang terjajah, termasuk Palestina. Pada tahun 1947, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Palestina sebagai entitas berdaulat, mencerminkan semangat anti-kolonialisme yang mendasari politik luar negeri Indonesia (Hafiz, 2020, hlm 78-90). Hubungan ini semakin diperkuat pada tahun 1988 ketika Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, dan Indonesia secara resmi memberikan dukungannya. Selama dekade 1990-an, Indonesia aktif di berbagai forum internasional, termasuk PBB dan OKI, menyuarakan pentingnya hak-hak Palestina dan membangun konsensus global untuk mendukung kemerdekaan mereka. Selain dukungan politik, Indonesia juga berkontribusi dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur, menunjukkan komitmennya untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Dengan demikian, dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya merupakan simbol solidaritas, tetapi juga bagian integral dari politik luar negeri yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan. (Firdaus dkk, 2020)

Pada tahun 2023, konflik antara Palestina dan Israel kembali meningkat, dengan kekerasan yang melanda wilayah Gaza dan Tepi Barat. Merespons situasi ini, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan agresi Israel, menyerukan penghentian kekerasan, dan perlindungan terhadap warga sipil.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memperkuat dukungannya melalui diplomasi aktif di forum internasional seperti PBB dan OKI, serta menggalang bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina. (Mudore, 2019) Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka di panggung internasional, mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.

Memasuki periode Jokowi jilid II (2019-2024), upaya pemerintah diperkuat dengan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran sebagai bentuk solidaritas nyata, misalnya pengiriman 51,5 ton kebutuhan pokok dan alat medis ke Gaza pada November 2023. Selain itu, Indonesia terus menggalang diplomasi aktif, mengeluarkan pernyataan resmi mengecam agresi Israel, dan memberikan dukungan hukum di Mahkamah Internasional. Pendekatan ini mencerminkan landasan *siyasah dauliyah* dalam Islam yang menekankan keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap kaum tertindas (Mudore, 2019; Setkab, 2023; Marsudi, 2024). Kepemimpinan Jokowi, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pendukung politik, tetapi juga sebagai pelopor dalam memberikan bantuan nyata kepada Palestina (Kemenlu, 2022) Kepemimpinan Retno Marsudi yang transformasional dan berbasis *soft power* menegaskan peran Indonesia sebagai negara *middle power* yang aktif memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara damai dan strategis. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan yang menjadi dasar politik luar negeri

Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menjalankan diplomasi yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga humanis untuk mendukung perjuangan Palestina (Setkab, 2015; Unitri, 2022). khususnya pada masa pemerintahannya yang kedua, Indonesia semakin aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pada tahun 2022, Presiden Jokowi menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam berbagai forum internasional, termasuk saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi PBB. Ia menyerukan agar dunia internasional lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik ini dan mendukung hak-hak rakyat Palestina. Selain itu, Indonesia juga mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina yang terdampak konflik, termasuk pengiriman obat-obatan dan makanan melalui organisasi internasional. Komitmen ini menunjukkan bahwa di bawah



UIN IMAM BONJOL

PADANG

Hal ini juga sejalan dengan penyampaian Ibu Retno Marsudi selaku kementerian luar negeri “Kita tidak akan menyerah. Sekali lagi kita tidak akan menyerah. Kita akan terus membantu mendukung perjuangan saudara-saudara kita Bangsa Palestina” Menlu menambahkan, Indonesia mendukung perjuangan Palestina melalui dukungan politik dan dukungan kemanusiaan. Dukungan politik diberikan di berbagai forum seperti PBB, OKI, dan organisasi internasional lainnya, termasuk dengan memberikan pandangan hukum di Mahkamah Internasional. (Marsudi : 2024)

Selain peran diplomasi, Indonesia menunjukkan solidaritas nyata melalui pengiriman bantuan kemanusiaan dan dukungan pada lembaga seperti UNRWA (*United Nations and Works Agency*) yang secara khusus membantu pengungsi

Palestina. Pemerintah juga aktif mengajukan resolusi di PBB yang mengecam tindakan sepihak Israel, seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang melanggar hak rakyat Palestina dan prinsip-prinsip hukum internasional (Fokus, 2018). Upaya ini tidak hanya bersifat simbolis semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk program bantuan pembangunan kapasitas di sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur di Palestina untuk memperkuat kemandirian rakyat Palestina (Hendra, 2018).

Siyasah dauliyah, atau politik luar negeri dalam Islam, berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap kaum yang tertindas. Hal ini juga menekankan bahwa dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina, prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam pendekatan diplomatik negara. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang mengalami penindasan. Politik luar negeri Indonesia tidak hanya sekadar tindakan diplomatik, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Ija, 2015) Dukungan Indonesia terhadap Palestina terlihat jelas dalam berbagai forum internasional, di mana negara ini secara konsisten menyerukan perlunya dialog dan negosiasi sebagai solusi damai untuk konflik. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai, serta menghindari penggunaan kekuatan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dengan demikian, *siyasah dauliyah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi Indonesia dalam menjalankan

politik luar negerinya, terutama dalam mendukung perjuangan Palestina. Konsep *siyasah dauliyah* dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap kaum yang tertindas. Menurut Al-Mawardi yang dikutip juga dari Muhammad Yusuf, Islam menekankan penegakan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam hubungan antarnegara. Seorang pemimpin Muslim harus bersikap adil dan memperlakukan semua negara secara setara, tanpa diskriminasi. Keadilan harus menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa dan pertikaian antar negara. (Muhammad dkk, 2022) Hal ini berarti pemerintah Muslim harus mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukan dan diskriminasi terhadap Palestina, serta menjunjung hak-hak rakyat Palestina atas tanah air mereka.

Selain itu, Islam juga mendorong terciptanya perdamaian dan menghindari perang kecuali dalam kondisi terpaksa untuk membela diri atau melindungi kaum yang tertindas. Pemimpin Muslim harus berupaya mengutamakan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik internasional, dan penggunaan kekuatan harus menjadi opsi terakhir setelah semua upaya damai tidak membuahkan hasil. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengedepankan perdamaian dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks Palestina- Israel, prinsip ini menuntut agar kedua belah pihak terlibat dalam dialog dan perundingan untuk mencapai solusi damai yang adil bagi kedua pihak. (Sunanta,2020)

Islam memerintahkan untuk membela dan melindungi hak-hak kaum yang teraniaya dan tertindas diseluruh dunia. Pemimpin Muslim memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara-

negara yang tertindas, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang berjuang melawan kolonialisme dan hegemoni asing. Prinsip ini menegaskan peran politik luar negeri dalam memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat manusia secara universal. Secara keseluruhan, *siyasah dauliyah* dalam Islam menekankan pada pentingnya menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian, dan melindungi kaum yang tertindas dalam hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. (Abdullah, 2021, hlm 45)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data latar belakang di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina perspektif *siyasah dauliyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa langkah langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina?
2. Apa peluang dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah* terkait upaya yang dilakukan Kemenlu Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina
2. Untuk mengetahui peluang dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dauliyah* terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina

1.5. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan kontribusi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta menyoroti bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dauliyah* dapat diterapkan dalam konteks politik luar negeri. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya diplomasi dan kemanusiaan, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan global.

1.6. Kerangka teoritis

1.6.1 Hubungan Internasional

Dalam hukum internasional, teori-teori dasar sangat penting untuk memahami dinamika interaksi antarnegara, termasuk bagaimana negara menjalankan kebijakan luar negeri dan mengambil peran dalam isu global. Tiga teori utama yang sering dijadikan dasar analisis adalah Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Ketiganya membantu menjelaskan perilaku negara di kancah internasional dengan pendekatan yang berbeda. Realisme menekankan persaingan dan kepentingan nasional di tengah sistem internasional yang anarkis. Liberalisme menawarkan pandangan bahwa kerja sama dan institusi internasional dapat menjadi kunci menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Sedangkan konstruktivisme menekankan pentingnya norma, nilai, dan identitas yang dibangun bersama dalam membentuk pola interaksi antarnegara. Keberadaan ketiga teori ini sangat relevan untuk membedah kasus-kasus konkret dalam hubungan internasional, seperti peran Indonesia dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan anggota aktif berbagai organisasi internasional, menunjukkan perwujudan nilai-nilai tersebut dalam upaya diplomatik dan kemanusiaan untuk mendukung kemerdekaan Palestina, yang merupakan salah satu isu penting di kancah global (Intermestic Unpad, 2024; Suara Presidensi, 2025).

Realisme dalam konteks ini melihat kebijakan Indonesia sebagai upaya mempertahankan kepentingan nasional dan

posisi strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah, sekaligus melindungi kepentingan umat Muslim secara global. Pendekatan realisme menggaris bawahi pentingnya kekuatan diplomasi dan hubungan strategis dengan aktor internasional lain untuk mendukung agenda kemerdekaan Palestina. Misalnya, Indonesia memanfaatkan posisi sebagai negara anggota nonblok yang bebas aktif untuk memainkan peran yang dihormati di dunia internasional dalam mediasi dan dukungan politik terhadap Palestina (Intermestic Unpad, 2024; Frontiers, 2024).

Pandangan liberalisme lebih menekankan peran Indonesia dalam membangun kerja sama internasional dan memperkuat organisasi multilateral, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai sarana memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia secara aktif menggalang dukungan politik dan kemanusiaan melalui jalur diplomasi dan bantuan publik, memperlihatkan bahwa solidaritas antarnegara serta institusi internasional yang kuat bisa menjadi modal memperkuat posisi Palestina di forum dunia (Intermestic Unpad, 2024; Semantic Scholar, 2016). Sikap ini juga tercermin dalam deklarasi dan pernyataan resmi Presiden Indonesia dari masa ke masa yang menegaskan kemerdekaan Palestina sebagai hak yang tak bisa ditawar (JCHI, 2014).

Sementara itu, konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas Indonesia sebagai negara dengan nilai kemanusiaan, komitmen pada keadilan, dan solidaritas umat Islam menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina. Dukungan Indonesia bukan hanya didasari kepentingan material, melainkan nilai-nilai yang

diyakini bersama dan terus dibangun melalui interaksi diplomatik dan sosial antara Indonesia dan Palestina. Contohnya, pengakuan awal Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia menjadi fondasi historis yang memperkuat hubungan emosional dan normatif antara kedua bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan internasional bisa berubah dan berkembang sesuai dengan konstruksi sosial dan norma bersama yang mempengaruhi identitas serta tujuan negara (Budiman, 2020; Millah, 2024; Semantic Scholar, 2018)

Dengan memahami ketiga teori tersebut secara bersama-sama, kita dapat lebih komprehensif melihat bagaimana Indonesia berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina: dari aspek kekuatan dan kepentingan nasional (realisme), kerja sama dan institusi internasional (liberalisme), hingga nilai dan identitas bersama yang melandasi tindakan diplomatik Indonesia (konstruktivisme). Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia meski beragam tantangan di arena global (JCHI, 2014; Frontiers, 2024; Intermestic Unpad, 2024) Oleh karena itu, penerapan hubungan internasional dalam konteks dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan diplomatik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang tertindas. Dalam proses ini, Indonesia dapat memanfaatkan forum-internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional untuk menyuarakan kepentingan Palestina, serta menciptakan tekanan internasional yang lebih besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Dengan demikian, hukum internasional berperan penting

dalam menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan global, sejalan dengan prinsip *siyasah dauliyah* yang menjadi acuan dalam politik luar negeri Indonesia, serta menegaskan komitmennya untuk keadilan dan solidaritas internasional.(Ismail, 2017)

1.6.2 *Siyasah dauliyah*

Siyasah dauliyah, atau politik luar negeri dalam Islam, mencakup cakupan yang lebih luas dari sekadar pengaturan hubungan antara negara Muslim dengan negara non-muslim. Konsep ini tidak hanya terbatas pada masalah diplomasi, perjanjian internasional, perang dan perdamaian, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip, aturan, dan kebijakan yang mengatur relasi tersebut.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kedamaian dan keadilan serta melarang segala bentuk kerusakan dan pembunuhan tanpa alasan yang benar, sebagaimana tertuang dalam firman Allah :



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik

Dalam *siyasah dauliyah*, terdapat prinsip-prinsip

fundamental seperti keadilan, persamaan, saling menghormati, dan menghindari agresi yang menjadi landasan bagi interaksi dan kerja sama antara negara Muslim dan non-Muslim. (Abdullah, 2021). Di samping itu, *siyasah dauliyah* juga mengatur aturan-aturan spesifik, seperti etika perang, perlindungan terhadap tawanan dan warga sipil, serta hukum traktat. Cakupan *siyasah dauliyah* bahkan lebih luas lagi, mencakup kebijakan-kebijakan negara Islam dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, *siyasah dauliyah* merupakan kerangka konseptual dan praktis yang komprehensif bagi Negara Muslim dalam mengelola relasi dengan negara non-Muslim berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam kajian ini, penting untuk memahami bahwa *siyasah dauliyah* tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral yang diambil dari ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional yang dibangun oleh negara-negara Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, perdamaian, dan saling menghormati. Dengan demikian, *siyasah dauliyah* berperan penting dalam membentuk kebijakan luar negeri negara-negara Islam, termasuk Indonesia, dalam konteks global yang semakin kompleks

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّكُمْ كَانُمْ
مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan

Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

1.7. Studi Literatur

Pembahasan mengenai Peran Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Kemerdekaan Palestina Perspektif *siyasah dauliyah*, bukanlah suatu hal yang baru, karena dibuktikan oleh penelitian yang membahas tentang peran pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Kemerdekaan Palestina walaupun ruang lingkup yang dibahas dalam beberapa penelitian tersebut berbeda

Penelitian yang berjudul "Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina." I Gede Sumertha KY, dkk pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan data melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan narasumber terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memahami peran Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina. Pada tahap pengumpulan data, penulis mengkaji berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, dan artikel terkait dengan isu konflik Israel-Palestina dan peran Indonesia di dalamnya. Interpretasi data dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep-konsep yang relevan, serta mempertimbangkan konteks historis, politik, dan sosial yang melatarbelakangi peran Indonesia. Berdasarkan hasil analisis

data, penulis menarik kesimpulan mengenai peran Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi. Kesimpulan disajikan secara komprehensif dan disertai dengan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat peran Indonesia di masa depan. Adapun yang membedakan penulisan peneliti dengan penulis ialah dapat dilihat dari fokus pada pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan narasumber terkait menyajikan data tentang kebijakan, deklarasi, dan pernyataan pemerintah Indonesia terkait isu ini, penelitian ini lebih menekankan pada hasil dan dampak dari keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian, sementara peneliti lebih fokus pada penerapan prinsip *siyasah dauliyah* dalam konteks dukungan terhadap Palestina. Meneliti bentuk-bentuk dukungan politik dan diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk Palestina. Mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam upaya tersebut serta bagaimana prinsip-prinsip *Siyasah dauliyah* diterapkan dalam kebijakan luar negeri. Analisis mendalam terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa penerapan prinsip *siyasah dauliyah* dalam dukungan Indonesia terhadap Palestina masih jarang dibahas, menciptakan celah pengetahuan yang perlu diisi oleh penelitian ini.

Penelitian yang ditulis oleh Ismail dan diterbitkan pada tahun 2017 dalam Jurnal Peurawi, edisi pertama, dengan judul "Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional: Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia." Dalam isi dokumen ini, penulis membahas konsep *siyasah dauliyah* yang berkaitan dengan kekuasaan kepala negara dalam mengatur hubungan Internasional, termasuk isu-isu seperti teritorial,

nasionalitas, dan perlindungan hak-hak minoritas. Ismail menjelaskan pentingnya komunikasi dalam diplomasi internasional serta tantangan yang dihadapi umat Islam, seperti kurangnya perdamaian dan perlindungan bagi minoritas etnis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Jika dibandingkan dengan yang penulis kaji lebih fokus pada aspek teoritis dan praktis dari komunikasi dalam konteks diplomasi internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam hubungan internasional. Sementara perbedaannya yaitu mungkin lebih bersifat deskriptif dan umum, analisis yang lebih mendalam tentang kebangkitan umat Islam melalui pendekatan komunikasi dan diplomasi. Perbedaan utama terletak pada kedalaman analisis dan fokus pada penerapan konsep dalam konteks modern. Tinjauan terhadap karya-karya sebelumnya mengindikasikan bahwa topik mengenai kontribusi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari perspektif *Siyasah dauliyah* belum pernah diangkat, sehingga penelitian ini akan memberikan perspektif baru yang signifikan

Penelitian yang ditulis oleh Iswandi, berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Jihad dan Bela Negara Warga Palestina dalam Mempertahankan Kedaulatan Palestina," diterbitkan dalam Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah pada tahun 2023. Artikel ini membahas secara mendalam konsep jihad dan bela negara dari perspektif fikih siyasah, menekankan bahwa jihad bukan sekadar tindakan kekerasan, melainkan sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk mempertahankan hak-hak dasar manusia yang terampas oleh penjajah. Iswandi menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif,

mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur hukum Islam, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Palestina saat ini, jihad dan bela negara dianggap sebagai respons yang sah terhadap penindasan dan kezaliman yang dialami warga Palestina. Perbedaannya dapat terletak pada fokus analisis atau metodologi yang digunakan. Misalnya, jika sebelumnya peneliti lebih menekankan aspek hubungan internasional atau politik, maka artikel Iswandi memberikan perspektif yang lebih berorientasi pada nilai-nilai agama Islam dan fikih. Penulis memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya memahami jihad dan bela negara dalam konteks sosial dan politik yang kompleks saat ini, terutama bagi masyarakat Palestina. Setelah mengevaluasi berbagai sumber yang relevan, peneliti menemukan bahwa kajian tentang pelaksanaan *siyasa dauliyah* dalam konteks dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina kurang mendapatkan perhatian yang menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengisi kekurangan tersebut

Penelitian yang ditulis oleh Wisnu Widyotomo dan Dr. Anwar Sadat, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada tahun 2023. "The Role of the United Nations in Resolving the Israel – Palestine Conflict / Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Israel - Palestina" ditulis oleh Dokumen ini membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, yang dianggap sebagai salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan fokus pada data sekunder yang diambil dari dokumen resmi, resolusi, laporan, dan artikel terkait. Wisnu menjelaskan bahwa konflik ini

berakar dari klaim teritorial dan identitas nasional yang bertentangan, dimulai pada awal abad ke-20. Upaya PBB untuk menyelesaikan masalah ini tercermin dalam Resolusi 181 pada tahun 1947, yang berusaha membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab, meskipun resolusi tersebut ditolak oleh negara-negara Arab. PBB telah mengeluarkan banyak resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, dengan Resolusi 242 yang diadopsi setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967 menjadi salah satu yang paling penting. Penelitian ini juga membahas pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota oleh PBB pada tahun 2012, yang meningkatkan legitimasi internasional Palestina. Namun, pengakuan ini juga memicu reaksi negatif dari Israel dan beberapa negara lain, yang memperburuk ketegangan di lapangan. Selain itu, badan PBB seperti UNRWA (*United Nations and Works Agency*) dibentuk untuk membantu pengungsi Palestina yang terkena dampak konflik, meskipun masih menghadapi banyak tantangan dalam operasionalnya. Evaluasi efektivitas PBB dalam mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina menjadi fokus utama penelitian ini. Meskipun PBB berhasil menciptakan platform untuk dialog, banyak resolusi yang tidak diimplementasikan sepenuhnya karena kurangnya kemauan politik dari kedua belah pihak. Perbedaan dalam penelitian yang diteliti ini lebih fokus pada peran dan efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sementara Peneliti menekankan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Indonesia, seperti bantuan kemanusiaan dan dukungan diplomatik, dokumen ini mengkaji bagaimana PBB berupaya mengurangi ketegangan di kawasan

melalui resolusi dan badan-badan internasional. Selain itu, mengeksplorasi pengakuan Palestina di panggung internasional, sedangkan yang peneliti sebelumnya lebih berorientasi pada perspektif *siyasah dauliyah* dalam konteks politik luar negeri Indonesia.

Penelitian yang ditulis Utami dan diterbitkan pada tahun 2021, dengan judul "Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif *Siyāsah Dauliyah*," Dalam penelitiannya, Utami mengkaji perlindungan yang diberikan kepada pengungsi Internasional di Indonesia serta peran pemerintah dalam konteks hukum dan prinsip *siyāsah dauliyah*. Skripsi ini menjelaskan bahwa konflik internal dan eksternal di berbagai negara menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi setiap tahunnya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, negara ini tetap memberikan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan *non-refoulement*. Penelitian ini juga mengidentifikasi kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam menangani masalah pengungsi. Utami menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif filosofis, serta menganalisis berbagai sumber dari instrumen internasional dan nasional. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang peneliti, terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip *siyāsah dauliyah* dalam perlindungan pengungsi. Sementara dokumen lain mungkin hanya membahas aspek hukum atau kebijakan, skripsi ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam *siyāsah dauliyah* sebagai landasan dalam perlindungan pengungsi di Indonesia. Hal ini

memberikan perspektif baru dan kontekstual yang relevan dalam memahami tanggung jawab Indonesia terhadap pengungsi internasional.

Artikel yang berjudul "*Palestine-Israel Conflict (Historical Overview)*" yang ditulis oleh Tamar Devidze dan Marekh Devidze, diterbitkan dalam jurnal *The New Economist* pada tahun 2024, Volume 19, Isu 1. Artikel ini membahas tentang konflik Israel-Palestina yang dianggap sebagai salah satu masalah paling sulit dan belum terpecahkan di dunia. Penulis menjelaskan bahwa di wilayah yang dikenal sebagai Palestina, populasi utama terdiri dari Arab dan Yahudi, di mana Arab merupakan penduduk asli dan mayoritas, sedangkan Yahudi adalah minoritas. Sejarah mencatat bahwa meski kedua kelompok ini pernah hidup berdampingan secara damai, situasi berubah drastis pada awal abad ke-20 dengan meningkatnya jumlah imigrasi Yahudi ke Palestina yang dipicu oleh gerakan Zionisme. Artikel ini memiliki latar belakang konflik, termasuk munculnya dua gerakan nasionalis di Palestina pada tahun 1940-an: Zionisme dan nasionalisme Arab-Palestina. Kedua gerakan ini berkontribusi terhadap ketegangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Penulis juga menyoroti berbagai upaya internasional yang dilakukan selama beberapa dekade untuk menyelesaikan konflik ini, yang sering kali berujung pada kegagalan, seperti serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang diikuti oleh serangan balasan Israel, menjadi bukti bahwa konflik ini tetap menjadi salah satu titik panas di dunia. Perbedaan utama antara penelitian ini dan sebelumnya terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Sementara sebelumnya mungkin lebih menekankan pada aspek politik atau sosial dari konflik tersebut, artikel ini memberikan

gambaran sejarah yang lebih menyeluruh, mengeksplorasi evolusi konflik dari perspektif sejarah dan mengaitkannya dengan peristiwa global yang lebih luas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjelaskan keadaan saat ini, tetapi juga memberikan konteks historis yang penting untuk memahami kompleksitas konflik Israel-Palestina.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, dalam hal ini adalah peran Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menggali data melalui studi literatur, analisis dokumen yang relevan. Penelitian kualitatif dipilih karena menekankan pada konteks dan makna dari pengalaman serta pandangan yang diperoleh selama proses penelitian, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terhadap isu yang dikaji (Abdullah, 2021)

Jenis penelitian kualitatif sangat sesuai digunakan dalam kajian hubungan internasional dan diplomasi, karena fenomena sosial seperti dukungan politik dan diplomasi kemanusiaan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami dari sudut pandang makna dan konteksnya. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terkait diplomasi Indonesia, misalnya dalam konteks konflik Palestina dan isu kemanusiaan, pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif memberikan ruang untuk menggali strategi, kebijakan, dan nilai-nilai yang mendasari tindakan diplomatik Indonesia secara mendalam (Manurung & Heriamsal, 2024)

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai *siyasah dauliyah* diterapkan dalam praktik diplomasi Indonesia, khususnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di kancah internasional (Hafiz, 2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai dukungan Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta prinsip-prinsip *siyasah dauliyah* yang mendasari politik luar negeri Indonesia terkait isu Palestina.



1.8.2 Sumber data

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019, hlm 315-350) Data yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari perspektif *siyasah dauliyah*. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung dari lapangan dalam penelitian ini adalah sumber aktif yaitu menanyakan langsung atau wawancara. (Rahmadi, 2011) Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Luar Negeri RI yaitu:

Kemenlu 2024, pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Palestina, pernyataan Resmi Kementerian Luar Negeri tentang dukungan Indonesia terhadap Palestina.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu bahan dari pustaka, literatur, buku-buku, dan lain sebagainya (Balaka, 2022). Seperti : Baldwin, D. A. (2016). *Power and International Relations*. Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia (2020). *The Globalization of World Politics*. Jurnal ilmiah dan Artikel ; Kajian Bein & Hajjar (2014). *Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict*, Muhammad Yusuf dkk. (2022). *Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi*. Azhami et al. (2024). *Konflik Israel-Palestina dan Peran PBB*. *The Palestinian Struggle for Independence* (2024). Jurnal ICMES. Sari, R. (2021). *Peran Indonesia dalam Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina*.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, serta dokumen resmi dari pemerintah atau organisasi internasional yang membahas peran Indonesia dalam kemerdekaan Palestina dari sudut pandang siyasah dauliyah (Mardani, 2020). Pengumpulan

data dilakukan secara sistematis dengan menelusuri literatur melalui perpustakaan, database jurnal daring, dan arsip digital untuk mendapatkan bahan yang valid dan terpercaya sebagai landasan analisis (Wahyudi, 2021).

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi dan klasifikasi data berdasarkan topik penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih terfokus pada kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia dalam konteks hubungan internasional dan siyasah dauliyah (Fatimah, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis isi atau content analysis untuk menemukan pola dan makna terkait peran politik serta diplomasi Indonesia terhadap Palestina (Sukardi, 2018). Proses ini dilanjutkan dengan menyusun abstraksi dan interpretasi data yang berhasil dikumpulkan agar memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif dalam menjawab masalah penelitian yang diajukan (Nurasikin, 2022).



1.8.4 Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Setiap sumber dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan antara dukungan pemerintah Indonesia dan implementasi prinsip-prinsip *siyasah dauliyah* dalam konteks diplomasi internasional. (Abdullah, 2021) Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yakni memilih data, memilih data yang relevan, mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan kajian teori yang telah dikaji secara mendalam. Langkah

awal dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, seperti literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema dukungan diplomasi Indonesia terhadap Palestina dalam kerangka *siyasah dauliyah*. Setelah data terkumpul, penulis melakukan proses pemilahan dan pemilihan data secara selektif untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan mendukung fokus penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, penulis mereduksi data dengan cara menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih terfokus, ringkas, dan bermakna. Proses reduksi ini dilakukan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan memperjelas data utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk dukungan politik, inisiatif kemanusiaan, tantangan diplomatik, serta penerapan prinsip-prinsip *siyasah dauliyah* dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam setiap tahapan analisis, penulis merujuk pada teori *siyasah dauliyah* dan mengaitkannya dengan konteks sejarah dan dinamika politik global yang relevan, agar hasil analisis memiliki kekuatan akademis dan praktis yang seimbang. Untuk menjamin keabsahan data, penulis juga menelaah kredibilitas dan validitas informasi dengan menerapkan teknik triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai literatur dan dokumen yang telah terverifikasi. Data dianalisis bukan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dijelaskan secara naratif melalui hasil telaah literatur, dokumentasi, dan pemahaman konseptual.

Akhirnya, penulis menyusun dan menginterpretasikan

data agar dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Analisis ini diharapkan tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan wawasan kebijakan yang relevan, khususnya dalam merumuskan arah diplomasi Indonesia yang lebih efektif dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan (Khallaf, 2005 dalam Manurung & Heriamsal, 2024). Hasil analisis diharapkan dapat menampilkan gambaran yang jelas tentang kontribusi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dukungan tersebut. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang (Hafiz, 2020)

